



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2023



0622 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id



PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING, S. H., M. H.
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



SORAYA RIZNA AFRIJAL, S.H.
PLT. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



AMIRUDDIN, S. H., M. H.
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kata Pengantar

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2023 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

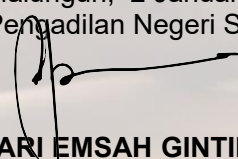
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Simalungun kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Sebagai penutup tahun 2023, Pengadilan Negeri Simalungun kembali berhasil meraih prestasi “*green flag*” penyelesaian perkara dengan nilai 91,47 persen. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga masih mempertahankan akreditasi dengan predikat “A” (*Excellent*). Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan namun juga sekaligus sebagai cambukan bagi Pengadilan Negeri Simalungun agar dapat terus melaksanakan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Simalungun : “**BERAKSI**” : “**Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, dan Inovatif**”.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2023, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Simalungun khususnya dan di Indonesia pada umumnya, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

*Salam Sehat, Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatu,
Om santi santi om*
Pengadilan Negeri Simalungun, BERAKSI !

Simalungun, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun


ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 40 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang Hakim, 23 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (Empat) misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan dengan menciptakan inovasi yang memudahkan bagi masyarakat. Inovasi - inovasi tersebut antara lain Brodi (Brosur Digital), E-3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan Persidangan) dan E-Pelita (Elektronik

Permohonan Salinan Putusan), E-Pesona (Elektronik Penilaian Personal), Syparis (System Pembayaran dengan Qris) dan masih banyak yang lainnya.

Pengadilan Negeri Simalungun mengelola 2 (dua) DIPA yaitu dari Badan Urusan Administrasi dengan Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2023 tanggal 30 November 2022 dengan total pagu Rp. 5.836.930.000,- yang terdiri dari Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.776.930.000,- dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 60.000.000,-, yang kemudian mengalami revisi anggaran sehingga Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi menjadi Rp 5.166.930.000,- dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung menjadi sebesar Rp 207.372.000,- Sedangkan DIPA dari Badan Peradilan Umum dengan Nomor DIPA-005.03.2.400371/2023 tanggal 30 November 2022 memiliki pagu sebesar Rp. 337.700.000,- yang seluruhnya merupakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melakukan penyerapan anggaran yang optimal yaitu DIPA 01 sebesar **99,83 %** dan DIPA 03 sebesar **100%**.

Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Peringkat Pertama Terbaik untuk Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) .

Kemudian, pada tanggal 6 September 2023 Pengadilan Negeri Simalungun, juga mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar sebagai Satuan Kerja Kerja Terbaik yaitu:

1. Peringkat Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Satker 400370 Semester I Tahun 2023 Kategori Pagu Sedang;
2. Peringkat Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Satker 400371 Semester I Tahun 2023 Kategori Pagu Sangat Kecil;

DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	5
C. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun	6
D. Budaya Kerja	6
E. Motto	8
F. Rencana Strategis (RENSTRA).....	8
BAB II	
A. Keadaan Perkara.....	11
B. Penyelesaian Perkara	14
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	14
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	15
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	16
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	18
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi	18
C. Capaian Prioritas Nasional	19
1. Posbakum	19
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	19
3. Perkara Prodeo	19
BAB III Sumber Daya Manusia	21
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	21
A. Mutasi.....	24
B. Promosi	26
C. Pensiun	26
D. Diklat	26
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	36
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	38
- Implementasi Ecourt	39
- Implementasi SIPP	41
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
A. Pembangunan Zona Integritas.....	44
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	49
C. Inovasi Pelayanan Publik	52
BAB VI Pengawasan	
A. Internal	59
B. Evaluasi	60
BAB VII Penutup	
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	64
Lampiran.....	

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023	11
Tabel 2. Implementasi E-Court Tahun 2023.....	11
Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023	11
Tabel 4. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2023	12
Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2023.....	12
Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2023	12
Tabel 7. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2023	13
Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2023	13
Tabel 9. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2023.....	13
Tabel 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus	14
Tabel 11. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus.....	14
Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu	15
Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu	15
Tabel 14. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	16
Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	16
Tabel 16. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	17
Tabel 17. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	17
Tabel 18. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	17
Tabel 19. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.....	18
Tabel 20. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	18
Tabel 21. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	18
Tabel 22. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2023	19
Tabel 23. SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang	23
Tabel 24. Keadaaan SDM Berdasarkan Jabatan	23
Tabel 25. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat	24
Tabel 26. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 27. Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2023	24
Tabel 28. Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2023	25
Tabel 29. Rekapitulasi Mutasi Tahun 2023	26
Tabel 30. Rekapitulasi Promosi Tahun 2023	26
Tabel 31. Rekapitulasi Pensiun Tahun 2023.....	26
Tabel 32. Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2023.....	26
Tabel 33. Rekapitulasi Diklat Tahun 2023	26
Tabel 34. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2023	27
Tabel 35. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun.....	30
Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun	33



<i>Tabel 37. Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2023</i>	36
<i>Tabel 38. Keadaan Rumah Dinas TA. 2023</i>	36
<i>Tabel 39. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2023</i>	37
<i>Tabel 40. Perangkat Keras IT Pengadilan Negeri Simalungun TA. 2023</i>	39
<i>Tabel 41. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2023</i>	40
<i>Tabel 42. Rata-rata Scor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Desember 2023</i>	52
<i>Tabel 43. Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2023</i>	52
<i>Tabel 44. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat</i>	59
<i>Tabel 45. Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023</i>	60

Daftar Gambar

Gambar 1. Misi Pengadilan Negeri Simalungun	6
Gambar 2. Motto Pengadilan Negeri Simalungun	8
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun	21
Gambar 4 Piagam Penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan	35
Gambar 5 Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar	35
Gambar 6 Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar	36
Gambar 7 Peta e-Court	40
Gambar 8 Tampilan <i>Screenshot</i> SIPP	41
Gambar 9 Tampilan <i>Screenshot</i> MIS Pengadilan Negeri Simalungun	42
Gambar 10 Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas	44
Gambar 11 Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas	45
Gambar 12 Rapat Unit Kesekretariatan.....	46
Gambar 13 Rapat Pleno Bulanan	46
Gambar 14 AKSI Kesekretariatan	47
Gambar 15 Rapat Tim RBI dalam Pemilihan Agen Perubahan.....	48
Gambar 16 Ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun	50
Gambar 17 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Lomba Pelayanan dari Dirjen PAPU	50
Gambar 18 Tampilan Aplikasi si-Super.....	50
Gambar 19. Deskripsi Inovasi e-Pelita	53
Gambar 20. Deskripsi Inovasi e-Pesona	53
Gambar 21. Deskripsi Inovasi Syaris.....	54
Gambar 22. Deskripsi Inovasi BRODI	54
Gambar 23. Deskripsi Inovasi Pangsid.....	55
Gambar 24. Deskripsi Inovasi e-Checklist	55
Gambar 25. Deskripsi Inovasi e-3P.....	56
Gambar 26. Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi	56
Gambar 27. Duta e-Court Pengadilan Negeri Simalungun	57



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Simalungun merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Simalungun harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami kenaikan dibanding Tahun sebelumnya. Pengadilan Negeri Simalungun juga masih melaksanakan sidang perkara pidana secara *online* sejak pertengahan tahun 2020 dan berlanjut dengan adanya *e-litigasi*.

Ketua Mahkamah Agung memperkuat payung hukum pelaksanaan sidang secara elektronik dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang disahkan tanggal 20 September 2020 dan Surak Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Simalungun dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Simalungun selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Program tunggakan minutasi nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
3. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stop integrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola secara satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada *website* Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B “www.pn-simalungun.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;
5. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan di sekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
6. Program Standarisasi Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri;
7. Pelaksanaan penyelesaian perkara secara mediasi;
8. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan atau bimbingan teknis;

Sasaran akhir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun, adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu

Gambar 1. Misi Pengadilan Negeri Simalungun



C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur

peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

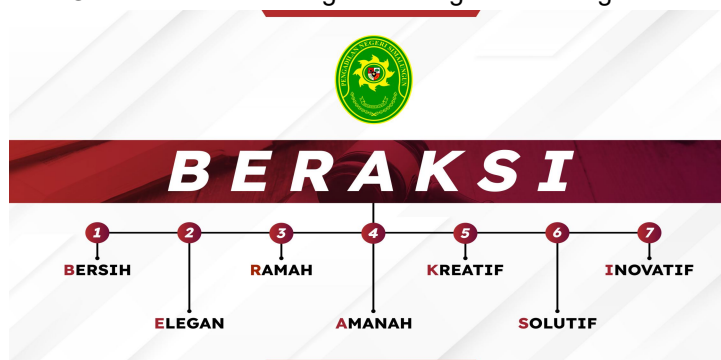
1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;

5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah **“BERAKSI”** yang merupakan akronim dari **“Bersih Elegan Ramah Amanah Kreatif Solutif dan Inovatif”**.

Gambar 2. Motto Pengadilan Negeri Simalungun



F. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Simalungun yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Simalungun;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*acces to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Simalungun secara akuntabel, efektif dan efisien.



BAB 2

A. KEADAAN
PERKARA

B. PENYELESAIAN
PERKARA

C. CAPAIAN
PRIORITAS
NASIONAL

**A. KEADAAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN****1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2023**

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Perkara Perdata

Tabel 1. Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	42	150	192	23	124	45
2	Perdata Permohonan	-	352	352	18	333	1
3	Gugatan Sederhana	-	15	15	-	14	1
4	Perlawanan/Derden Verzet	1	3	4	-	-	3
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	0	12	12	-	11	1
7	Eksekusi	10	24	34	1	24	9

Statistik Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Simalungun

Tabel 2. Implementasi E-Court Tahun 2023

No.	Pengadilan	Jlh Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantuan	Gugatan Sederhana	Total
1	Pengadilan Negeri Simalungun	503	148.556.000	150	335	15	3	503
	Jumlah	503	148.556.000	150	335	15	3	503

b. Keadaan Perkara Pidana

Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	18	364	481	-	354	22
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	5	4	-	5	-
4	Lalu Lintas	-	1.263	205	-	1.263	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	13	17	-	10	-
7	Pidana Peradilan	-	3	4	-	2	-

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2023

a. Keadaan Perkara Perdata Banding :

Tabel 4. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	10	33	43	0	34	9
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	1	4	5	0	5	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

b. Keadaan Perkara Pidana Banding :

Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	20	85	102	-	72	33
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	-	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2023

a. Keadaan Perkara Perdata Kasasi :

Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	22	20	42	1	18	23
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

b. Keadaan Perkara Pidana Kasasi :

Tabel 7. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	28	61	89	-	35	14
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2023

a. Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :

Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	4	4	8	0	5	3
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/ Deden Verzet	1	0	1	0	1	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	10	24	34	1	24	9

b. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (PK) :

Tabel 9. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	2	3	5	1	4
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-

**B. PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN****1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus**

Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus pada tahun 2023. Berikut uraian setiap jenis perkara di Pengadilan Negeri Simalungun;

a. Perkara Perdata :

Tabel 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Sisa Tahun 2022 Yang Dicabut 2023	Sisa Tahun 2022 Yang Diputus 2023	Sisa Perkara 2023 Yang Belum Putus
1	Perdata Gugatan	42	5	37	45
2	Perdata Permohonan	0	0	0	1
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	1
4	Perlawanan/Derden Verzet	1	0	1	3
5	PHI	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	1
Jumlah		43	5	38	51

b. Perkara Pidana :

Tabel 11. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Sisa Tahun 2022 Yang Dicabut 2023	Sisa Tahun 2022 Yang Diputus 2023	Sisa Perkara 2023 Yang Belum Putus
1	Pidana Biasa	18	-	18	41
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-
Jumlah		18	0	12	41

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai berikut :

a. Perkara Perdata :

Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban Perkara Tahun 2023	Perkara Yang Diputus Tahun 2023	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	42	150	192	147	109	38
2	Perdata Permohonan	0	352	352	351	351	0
3	Gugatan Sederhana	0	15	15	14	14	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	1	3	4	1	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	12	12	11	11	0
7	Eksekusi	10	24	34	24	9	15
Jumlah		53	556	609	548	494	53

b. Perkara Pidana :

Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban Perkara Tahun 2023	Perkara Yang Diputus Tahun 2023	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	18	364	381	354	354	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	5	5	5	5	-
4	Lalu Lintas	-	1.349	1.349	1.349	1.349	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	14	14	13	13	-
7	Pidana Peradilan	-	3	3	3	3	-
Jumlah		18	1.735	1.752	1.725	1.725	-

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.

Berikut adalah jumlah perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2023 :

a. Upaya Hukum Banding

❖ Perkara Perdata :

Tabel 14. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2022 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2023 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	6	147	33	120
2	Perdata Permohonan	-	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-
4	Perlawanan/ Deden Verzet	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-
Jumlah		6	147	33	120

❖ Perkara Pidana:

Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2022 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2023 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	15	355	85	285
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	5	-	-
4	Lalu Lintas	-	1349	-	1349
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	13	2	12
7	Pidana Praperadilan	-	3	-	-
Jumlah		15	1.724	87	344

b. Upaya Hukum Kasasi

❖ Perkara Perdata :

Tabel 16. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2023	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	6	32	3	29
2	Perdata Permohonan	-	-	-	-
Jumlah		6	32	3	29

❖ Perkara Pidana:

Tabel 17. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2023	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	8	73	63	18
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-
7	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
Jumlah		8	74	64	18

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

❖ Perkara Perdata :

Tabel 18. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2023 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2023 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2023	Permohonan PK Tahun 2023	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2023
1	Perdata Gugatan	72	14	15	4	10
2	Perdata Permohonan	352	-	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	14	4	-	-	-
4	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-
Jumlah		438	18	15	4	10

❖ Perkara Pidana :

Tabel 19. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2023 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2023 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2023	Permohonan PK Tahun 2023	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2023
1	Pidana Biasa	-	-	-	4	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	5	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	1349	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	13	-	1	-	14
7	Pidana Praperadilan	5	-	-	-	5
Jumlah		1372		1	4	19

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil di Mediasi Tahun 2023 :

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2023	Status				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	67	6	-	60	-	-
Jumlah		67	6		60		

Tabel 20. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil melalui diversi pada tahun 2023 :

Tabel 21. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak 2023	Jumlah Perkara Diversi 2023	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	14	1	1	-	-
Jumlah		14	1	1	-	-

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Tabel 22. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2023

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan				
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH SUMUT MANDIRI	312	31.200.000	31.200.000	0

Jenis layanan yang diberikan oleh POSBAKUM adalah :

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Simalungun tidak melaksanakan sidang keliling/ pelayanan terpadu sepanjang tahun 2023.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 nihil karena tidak ada pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2023. Selain daripada itu tidak tersedia anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2023.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB 3

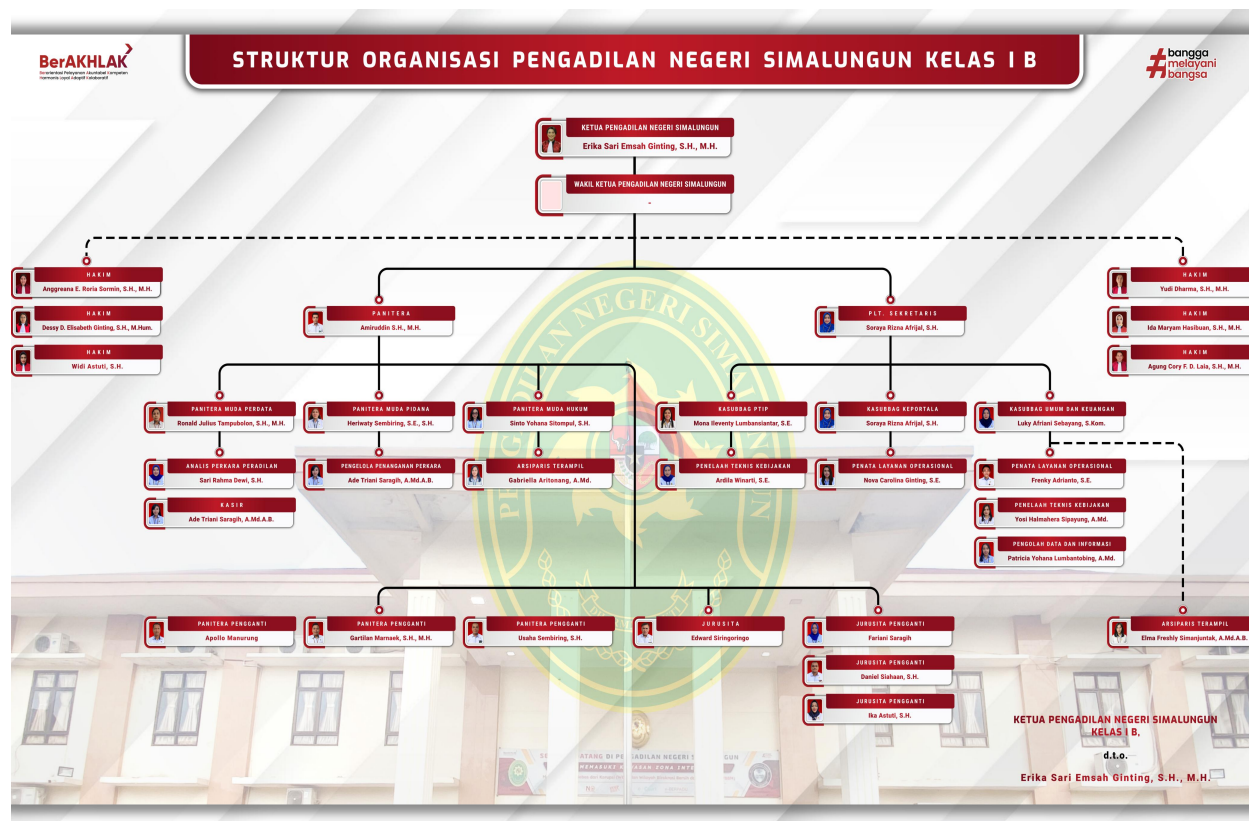
Sumber Daya Manusia

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi baik institusi ataupun yang lainnya sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkannya.

Pengadilan Negeri Simalungun merupakan salah satu instansi pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan publik, dimana pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pegawai Negeri Simalungun) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Tabel 23. SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/ Gol Ruang

NO.	Nama	Jabatan	Pangkat
1	ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH., M.H.	Ketua	IV/b
2	ANGGREANA ELISABETH RORIA SORMIN, S.H. M.H.	Hakim	IV/a
3	DESSY DERIA ELISABETH GINTING, S.H. M.Hum	Hakim	IV/a
4	YUDI DHARMA, S.H., M.H.	Hakim	IV/a
5	WIDI ASTUTI, S.H.	Hakim	III/d
6	IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H.	Hakim	III/d
7	AGUNG CORY F.D. LAIA, S.H., M.H.	Hakim	III/d
8	AMIRUDDIN, S.H, M.H	Panitera	IV/a
9	SORAYA RIZNA AFRIJAL, S.H.	Plt. Sekretaris/Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	III/c
10	HERIWATY SEMBIRING, S.E, S.H	Panitera Muda Pidana	III/d
11	RONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.H, M.H.	Panitera Muda Perdata	IV/a
12	SINTO YOHANA SITOMPUL, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
13	MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, S.E.	Kasub Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	III/c
14	LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	III/c
15	APOLLO MANURUNG	Panitera Pengganti	III/c
16	GARTILAN MARNAEK, S.H, M.H	Panitera Pengganti	III/d
17	USAHA SEMBIRING, S.H.	Panitera Pengganti	III/c
18	EDWARD SIRINGORINGO	Jurusita	III/b
19	IKA ASTUTI, S.H.	Jurusita Pengganti	III/c
20	FARIANI SARAGIH	Jurusita Pengganti	III/b
21	DANIEL SIAHAAN	Jurusita Pengganti	III/a

22	NOVA CAROLINA GINTING, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	III/b
23	RIRIS FATMAWATI PANJAITAN, S.H.	Klerek- Analis Perkara Peradilan	III/b
24	SARI RAHMA DEWI, S.H	Klerek-Analis Perkara Peradilan	III/a
25	FRENKY ADRIANTO T, SE	Operator-Penata Layanan Operasional	III/a
26	ELMA FRESHLY SIMANJUNTAK, A.Md.A.B.	Arsiparis	II/c
27	YOSI HALMAHERA SIPAYUNG, A.Md	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	II/d
28	ARDILA WINARTI, S.E	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	III/a
29	PATRICIA YOHANA LUMBANTOBING, A.Md	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	II/c
30	ADE TRIANI SARAGIH, A.Md.A.B	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	II/c
31	GABRIELLA ARITONANG, A.Md	Arsiparis	VII

Tabel 24. Keadaan SDM Berdasarkan Jabatan

No	Satuan Kerja	Hakim			Teknis					Sekretaris	Kasub. Bag	Pelaksana	Jlh
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Panmud	Panitera Pengganti	Jurista	Jurusita Pengganti				
1	PN Simalungun	1	-	6	1	3	3	1	3	-	3	10	31

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pangkat / Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat

No	Jabatan	Pangkat												
		VII	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	Ketua										1			
2	Wakil Ketua	NIHIL												
3	Hakim								3	3				
4	Panitera									1				
5	Sekretaris	NIHIL												
6	Panitera Muda								2	1				
7	Kasub. Bag							3						

8	Panitera Pengganti							2	1					
9	Jurusita						1							
10	Jurusita Pengganti					1	1	1						
11	Pelaksana	1		3	1	3	2							
	Jumlah	1		3	1	4	4	6	5	5	1			

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan				
		SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Ketua				1	
2	Wakil Ketua				-	
3	Hakim			1	5	
4	Panitera				1	
5	Sekretaris			-		
6	Panitera Muda			2	1	
7	Kasub. Bag			3		
8	Panitera Pengganti	1		1	1	
9	Jurusita	1				
10	Jurusita Pengganti	2		1		
11	Pelaksana		5	5		
	Jumlah	4	5	13	9	

A. Mutasi

Mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2023 Hakim dan Pegawai yang mutasi adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk

Tabel 27. Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2023

No	Nama/ NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H,M.H.	VI/b	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2	Ida Ida Maryam Hasibuan, S.H.	III/d	Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3	Agung C. F.D Laia, S.H., M.H	III/d	Hakim Pengadilan Negeri Tarutung	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4	Gabriella Aritonang, A.Md/ NIP.1998092320232120 04	VII	-	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Mutasi Keluar

Tabel 28. Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2023

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.	IV/b	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus
2	Golom Silitonga, S.H., M.H.	IV/b	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Kelas I B
3	Aries Kata Ginting, S.H.	III/d	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II
4	Citra A Harahap, S.E./ NIP.198208292009042001	III/d	Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun	Kepala Bagian Umum Pengadilan Tinggi Medan
5	Lumida Siahaan, S.H./ NIP.	III/b	Analisis Perkara	Panitera Pengganti

	198212232010012036		Peradilan Pengadilan Negeri Simalungun	Pengadilan Negeri Balige
--	--------------------	--	---	-----------------------------

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rekapitulasi Mutasi Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
		Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PN Simalungun	3	-	1	4	3	-	2	5

B. Promosi

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Rekapitulasi Promosi Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Promosi Sebagai								Jlh
		Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Sekret aris	Panmud	Kasubag	Panitera Pengga nti	Ka ba g	
	PN Simalungun	1	1	-	-	-	-	1	1	4

C. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Rekapitulasi Pensiun Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Sebab Pensiun			Jumlah
		Batas Usia	Meninggal	Pensiun Dini	
N	I	H	I	L	N

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yang pensiun Tahun 2023 :

Tabel 32. Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2023

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan	TMT Pensiun
N	I	H	I	L

D. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Rekapitulasi Diklat SDM Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jenis Diklat					
		Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Bimtek	Latsar CPNS
1	PN Simalungun	-	-	17	-	13	-

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 :

Tabel 34. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2023

No	Nama/NIP	Nama Diklat	Penyelenggara
1	Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H./ NIP.197907202002122004	Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri Khusus Pemilu	Pengadilan Tinggi Medan
2	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H./ NIP. 19810062006042005	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	BALITBANG KUMDIL MARI
3	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H./ NIP. 19810062006042005	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan IV	BALITBANG KUMDIL MARI
4	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H./ NIP. 19810062006042005	Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
5	Dessy Deria E Ginting, S.H.,M.Hum	Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
6	Aries Kata Ginting, S.H./ NIP. 198004072007041001	Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
7	Yudi Dharma, S.H.M.H./ NIP.197711042007041001	Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri Khusus Pemilu	Pengadilan Tinggi Medan

8	Yudi Dharma, S.H.M.H./ NIP.197711042007041001	Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
9	Widi Astuti, S.H/ NIP.198409162008052002	Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri Khusus Pemilu	Pengadilan Tinggi Medan
10	Citra Andriany Harahap, S.E/ NIP. 198208292009042001	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pimpinan Pengadilan	BALITBANG KUMDIL MARI
11	Citra Andriany Harahap, S.E/ NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik	BALITBANG KUMDIL MARI
12	Soraya Rizna Afrijal, S.H/ NIP. 199110032014032004	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	BALITBANG KUMDIL MARI
13	Soraya Rizna Afrijal, S.H/ NIP. 199110032014032004	Pelatihan Manajemen ASN	BALITBANG KUMDIL MARI
14	Soraya Rizna Afrijal, S.H/ NIP. 199110032014032004	Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	BPPK Kemenkeu Pekanbaru
15	Gabriella Aritonang, A.Md/ NIP.199809232023212004	Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	BALITBANG KUMDIL MARI
16	Frenky Adrianto T, S.E.	Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	BPPK Kemenkeu Pekanbaru

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 :

No	Nama/NIP	Nama Bimbingan Teknis	Penyelenggara
1	Citra Andriany Harahap, S.E/ NIP. 198208292009042001	Pelatihan Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan	Pengadilan Tinggi Medan
2	Soraya Rizna Afrijal, S.H/ NIP. 199110032014032004	Pelatihan Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan	Pengadilan Tinggi Medan



3	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E./NIP. 198505112011012003	Pelatihan Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan	Pengadilan Tinggi Medan
---	---	--	----------------------------



PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



BAB 4



A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Negeri Simalungun mengelola 2 (dua) DIPA yaitu dari Badan Urusan Administrasi dengan Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2023 tanggal 30 November 2022 dengan total pagu Rp. 5.836.930.000,- yang terdiri dari Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.776.930.000,- dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 60.000.000,-, yang kemudian mengalami revisi anggaran sehingga Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi menjadi Rp 5.166.930.000,- dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung menjadi sebesar Rp 207.372.000,- Sedangkan DIPA dari Badan Peradilan Umum dengan Nomor DIPA-005.03.2.400371/2023 tanggal 30 November 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 337.700.000,- yang seluruhnya merupakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 35. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5.374.302.000	5.365.366.245	99,83%	8.935.755	0,17%
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.374.302.000	5.365.366.245	99,83%	8.935.755	0,17%
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.166.930.000	5.157.995.913	99,83%	8.934.087	0,17%
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.166.930.000	5.157.995.913	99,83%	8.934.087	0,17%
1066.EBA.962	Layanan Umum	5.520.000	5.493.000	99,51%	27.000	0,49%
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	5.520.000	5.493.000	99,51%	27.000	0,49%
A	Inventaris Perkantoran CPNS	5.520.000	5.493.000	99,51%	27.000	0,49%
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	5.520.000	5.493.000	99,51%	27.000	0,49%
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.161.410.000	5.152.502.913	99,83%	8.907.087	0,17%
001	Gaji dan Tunjangan	3.817.821.000	3.809.063.117	99,77%	8.757.883	0,23%
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	3.817.821.000	3.809.063.117	99,77%	8.757.883	0,23%



511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.575.096.000	1.574.898.800	99,99%	197.200	0,01%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	21.305	92,63%	1.695	7,37%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98.432.000	98.428.370	100,00%	3.630	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.796.000	33.794.584	100,00%	1.416	0,00%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00%	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.507.716.000	1.504.610.000	99,79%	3.106.000	0,21%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	169.824.000	168.581.470	99,27%	1.242.530	0,73%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85.166.000	85.165.920	100,00%	80	0,00%
511129	Belanja Uang Makan PNS	273.398.000	269.264.000	98,49%	4.134.000	1,51%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23.100.000	23.100.000	100,00%	0	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.589.000	10.588.800	100,00%	200	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	188	18,80%	812	81,20%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000	1.400.000	100,00%	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	290.000	289.680	99,89%	320	0,11%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	2.590.000	2.520.000	97,30%	70.000	2,70%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.343.589.000	1.343.439.796	99,99%	149.204	0,01%
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	452.080.000	452.079.250	100,00%	750	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	392.060.000	392.059.250	100,00%	750	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00%	0	0,00%
B	Langganan Daya dan Jasa	182.019.000	181.961.908	99,97%	57.092	0,03%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.815.000	170.791.122	99,99%	23.878	0,01%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.774.000	6.747.500	99,61%	26.500	0,39%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.188.000	1.186.936	99,91%	1.064	0,09%
522113	Belanja Langganan Air	600.000	594.350	99,06%	5.650	0,94%
522141	Belanja Sewa	2.642.000	2.642.000	100,00%	0	0,00%



C	Pemeliharaan Kantor	491.672.000	491.670.938	100,00%	1.062	0,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.720.000	275.719.637	100,00%	363	0,00%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61.256.000	61.256.000	100,00%	0	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.696.000	154.695.301	100,00%	699	0,00%
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	107.512.000	107.512.000	100,00%	0	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27.868.000	27.868.000	100,00%	0	0,00%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.644.000	79.644.000	100,00%	0	0,00%
G	Rapat Koordinasi Internal	4.730.000	4.730.000	100,00%	0	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.730.000	4.730.000	100,00%	0	0,00%
H	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	86.240.000	86.240.000	100,00%	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.240.000	86.240.000	100,00%	0	0,00%
I	Konsultasi kw KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL	8.320.000	8.320.000	100,00%	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.320.000	8.320.000	100,00%	0	0,00%
J	Penanganan COVID-19	11.016.000	10.925.700	99,18%	90.300	0,82%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	11.016.000	10.925.700	99,18%	90.300	0,82%
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	207.372.000	207.370.332	100,00%	1.668	0,00%
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	207.372.000	207.370.332	100,00%	1.668	0,00%
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	98.366.000	98.366.000	100,00%	0	0,00%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	98.366.000	98.366.000	100,00%	0	0,00%
A	Fasilitas Perkantoran	98.366.000	98.366.000	100,00%	0	0,00%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.366.000	98.366.000	100,00%	0	0,00%
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	109.006.000	109.004.332	100,00%	1.668	0,00%
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	109.006.000	109.004.332	100,00%	1.668	0,00%
A	Pengadaan Prasarana Pendukung Disabilitas	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%



B	Jaringan Anti Arde/Anti Petir	49.006.000	49.004.332	100,00%	1.668	0,00%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	49.006.000	49.004.332	100,00%	1.668	0,00%

Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	337.700.000	337.698.500	100,00%	1.500	0,00%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	337.700.000	337.698.500	100,00%	1.500	0,00%
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	337.700.000	337.698.500	100,00%	1.500	0,00%
1049.AEA	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	305.000.000	304.998.500	100,00%	1.500	0,00%
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	305.000.000	304.998.500	100,00%	1.500	0,00%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	173.850.000	173.850.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	173.850.000	173.850.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	5.490.000	5.490.000	100,00%	0	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	168.360.000	168.360.000	100,00%	0	0,00%
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	29.764.000	29.764.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	29.764.000	29.764.000	100,00%	0	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.264.000	1.264.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.500.000	28.500.000	100,00%	0	0,00%
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	350.000	350.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	350.000	350.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	350.000	350.000	100,00%	0	0,00%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	24.712.000	24.712.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	24.712.000	24.712.000	100,00%	0	0,00%

521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.212.000	2.212.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	22.500.000	100,00%	0	0,00%
056	Minutasi/Upaya hukum	6.100.000	6.100.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	6.100.000	6.100.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.100.000	6.100.000	100,00%	0	0,00%
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	40.216.000	40.216.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	40.216.000	40.216.000	100,00%	0	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.266.000	2.266.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.950.000	37.950.000	100,00%	0	0,00%
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	30.008.000	30.006.500	100,00%	1.500	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	30.008.000	30.006.500	100,00%	1.500	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.608.000	6.606.500	99,98%	1.500	0,02%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000	23.400.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	31.200.000	31.200.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	31.200.000	31.200.000	100,00%	0	0,00%
051	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	31.200.000	31.200.000	100,00%	0	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00%	0	0,00%

Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Peringkat Pertama Terbaik se Sumatera Utara untuk Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) .

Kemudian, pada tanggal 6 September 2023 Pengadilan Negeri Simalungun, juga mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar sebagai Satuan Kerja Kerja Terbaik yaitu:

1. Peringkat Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Satker 400370 Semester I Tahun 2023 Kategori Pagu Sedang;
2. Peringkat Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Satker 400371 Semester I Tahun 2023 Kategori Pagu Sangat Kecil.

Prestasi ini merupakan suatu keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola keuangan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

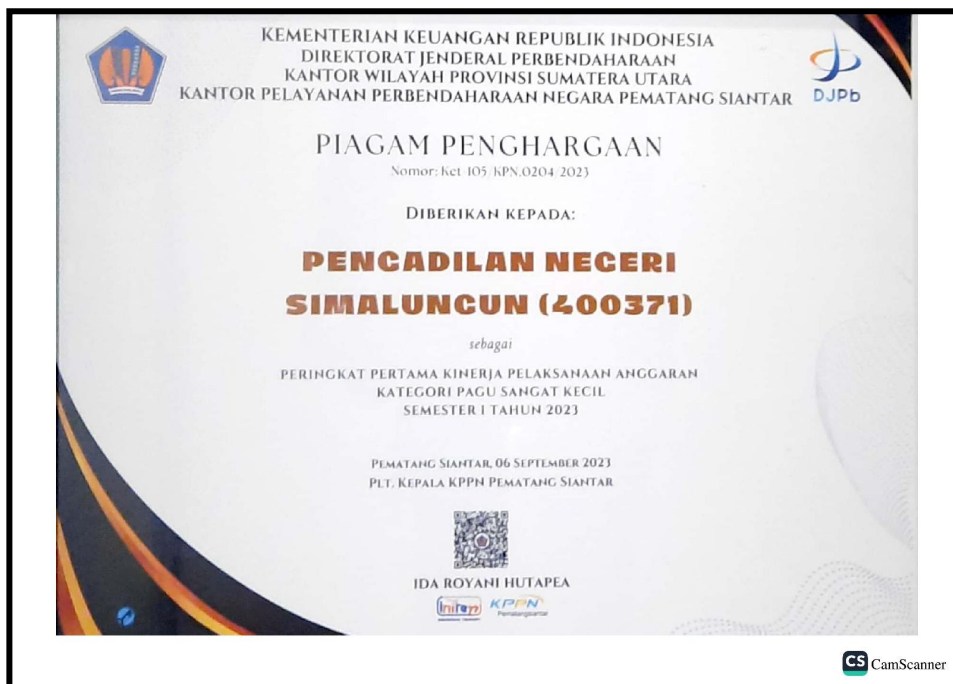
Gambar 4. Piagam Penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan



Gambar 5. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.



Gambar 6. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Kendaraan Dinas

Tabel 37. Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2023:

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	Innova Zenix	2023	v			Pemkab
2	Kijang Innova 1002 T	2008		✓		MARI
3	Kijang Innova 1265 T	2011	✓			MARI
II	Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro 2376 T	2008	✓			MARI
2	Supra 125 2377 T	2008	✓			MARI
3	Supra 125 2006 T	2006	✓			MARI
4	Supra 125 2005 T	2006	✓			MARI

b. Rumah Dinas

Tabel 38. Keadaan Rumah Dinas TA. 2023.

No	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	v			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	v			
3.	Rumah Dinas Hakim	3	v			
4.	Rumah Dinas Panitera	1	v			

5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	v			
----	------------------------	---	---	--	--	--

c. Sarana Dan Prasarana

Tabel 39. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Sarana Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Tahanan	2	
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Kepegawaian	1	
11	Ruang PTIP	1	
12	Ruang Perpustakaan	1	
13	Ruang Arsip	1	
14	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
15	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	
16	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
17	Ruang Mediasi, Diversi dan Kaukus	1	
18	Ruang Ramah Anak	1	
19	Ruang Posbakum	1	
20	Ruang Tunggu Jaksa	1	
21	Ruang Tunggu Advokat	1	
22	Ruang Laktasi dan Kesehatan	1	
II Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	P.C	27	
2	Lap top	20	
3	LCD Monitor	10	
4	Tablet PC	1	
5	A.C Split	24	
6	Portable Air Conditioner	2	
7	Facsmile	1	
8	Genset	1	
9	Printer	11	
10	CPU	1	
11	Scanner	5	
12	Server	4	
13	Router	1	
14	CCTV	2	
15	Mesin Absensi	1	
16	Mesin Antrian	1	
17	Tape Recorder	1	
18	Loudspeaker	5	
19	Sound System	2	
20	Microphone	2	
21	Microphone Table Stand	6	
22	Mic Conference	3	
23	Microphone/Wireless MIC	1	
24	Audio Amplifier	1	

25	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
26	Video Monitor	1	
27	Camera Conference	1	
28	Telephone Mobile	1	
29	Local Area Network (LAN)	1	
30	Komputer Jaringan Lainnya	1	
31	Firewall	1	
32	Wireless Acces Point	12	
33	Switch	10	
34	Ethernet Converter	7	
35	Lemari Kayu	21	
36	Rak Besi	6	
37	Filing Cabinet Besi	12	
38	Brandkas	1	
39	White Board	3	
40	Meja Kerja Kayu	59	
41	Kursi Besi/Metal	77	
42	Kursi Kayu	8	
43	Sice	4	
44	Bangku Panjang Besi/Metal	4	
45	Bangku Panjang Kayu	18	
46	Meja Rapat	2	
47	Meja Resepsionis	1	
48	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
49	Alat Kantor Lainnya	1	
50	Kipas Angin	10	
51	Tiang Bendera	11	
52	Palu Sidang	2	
53	Lambang Instansi	1	
54	Bracket Standing Peralatan	1	
55	Rak Peralatan	1	
56	Rak Server	4	
57	Monografi	53	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Simalungun menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Pengadilan Negeri Simalungun telah dilengkapi dengan sistem IT yang mumpuni, berikut perangkat keras IT yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun :

Tabel 40. Daftar Perangkat Keras IT Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023

No	Nama Barang	Type/Merk	Keterangan
1	Server	Server <i>fujitsu</i> RX2520M5 32 GB	server Tipe A Satker 3T
2	Server	Server RX2520M5 w/win storage server	Server Storage Eselon 1
3	Laptop	Fujitsu intel core i3	Laptop
4	Rak server	AR3104 RAK dan PDU - APC	Rak Server Room
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS - APC SMT2200RM12UNC	UPS
6	Rak Server	Indorack RAK PDU	Rack Network Wallmount
7	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Distribusi Tipe 2
8	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Access PoE
9	Ethernet Converter	Ruckus 10GbE Direct Attach 10G-SFPP-TWX-0101	DAC
10	Wireless Access Point	Ruckus R550-WW00	Access Point
11	Firewall	Palo Alto Networks PA-220	Firewall

Pengadilan Negeri Simalungun juga dilengkapi dengan jaringan internet menggunakan provider fibernet, dengan kecepatan 100 Mbps *dedicated*. Tentu saja hal itu sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang saat ini menggunakan SIPP versi 5.3.1 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.3.1 Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

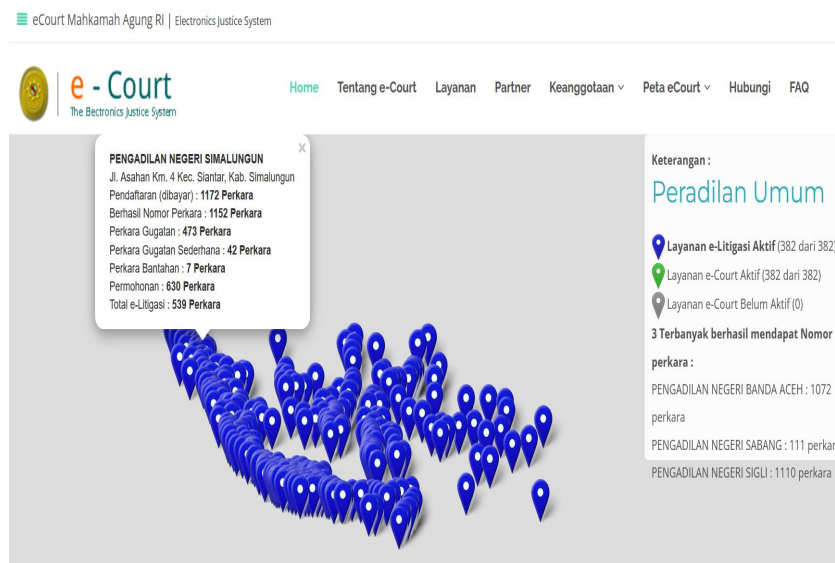
➤ Implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Simalungun

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan dengan menerima pendaftaran perkara perdata melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id dan juga telah melaksanakan persidangan secara e-litigasi. Adapun data perkara yang melalui e-court dan e-litigasi adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2023

No	Perkara	Perkara Masuk Non E-Court	E-Court	E-Litigasi
1	Gugatan	-	153	26
2	Permohonan	17	352	-
3	Gugatan Sederhana	-	15	-
4	Bantahan	-	3	-
Jumlah		17	523	521

Gambar 7. Peta E-Court Peradilan Umum Se-Indonesia Tahun 2023.



Sebagai salah satu dukungan terhadap implementasi *e-Court*, Pengadilan Negeri Simalungun juga telah menyediakan Meja *e-Court* dan Duta *E-Court* dimana para calon pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dapat dibantu untuk proses mendapatkan akun. Selain itu, Meja *e-Court* juga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Terdaftar dan atau Pengguna Lain untuk mendaftarkan perkaranya.

Banner dan brosur yang memuat berbagai informasi tentang *e-Court* juga tersedia pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun.

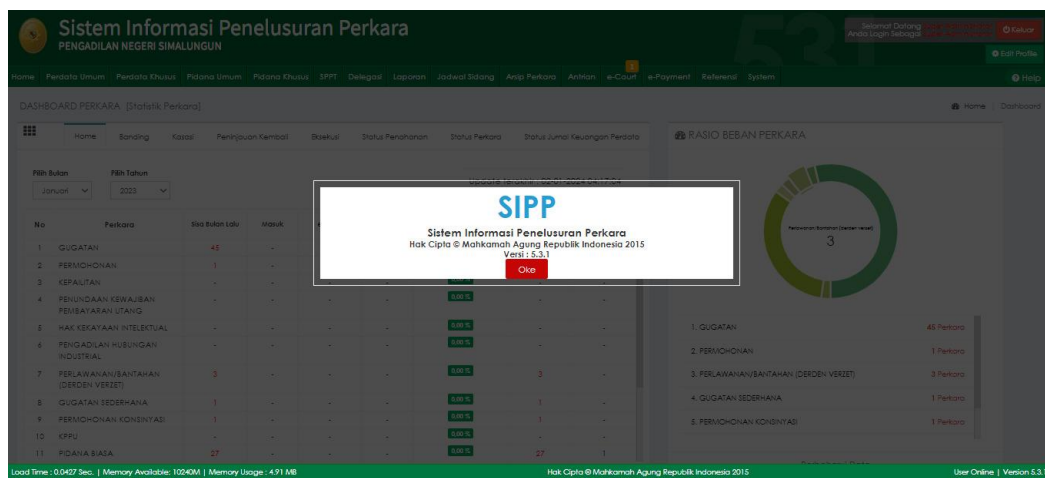
Saat ini sudah tidak ada kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dalam implementasi *e-court* dan *e-litigasi* karena para pencari keadilan sudah banyak yang melek teknologi dan merasakan

kemudahan dan manfaat yang luar biasa dengan adanya *e-court* dan *e-litigasi*.

➤ Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Simalungun

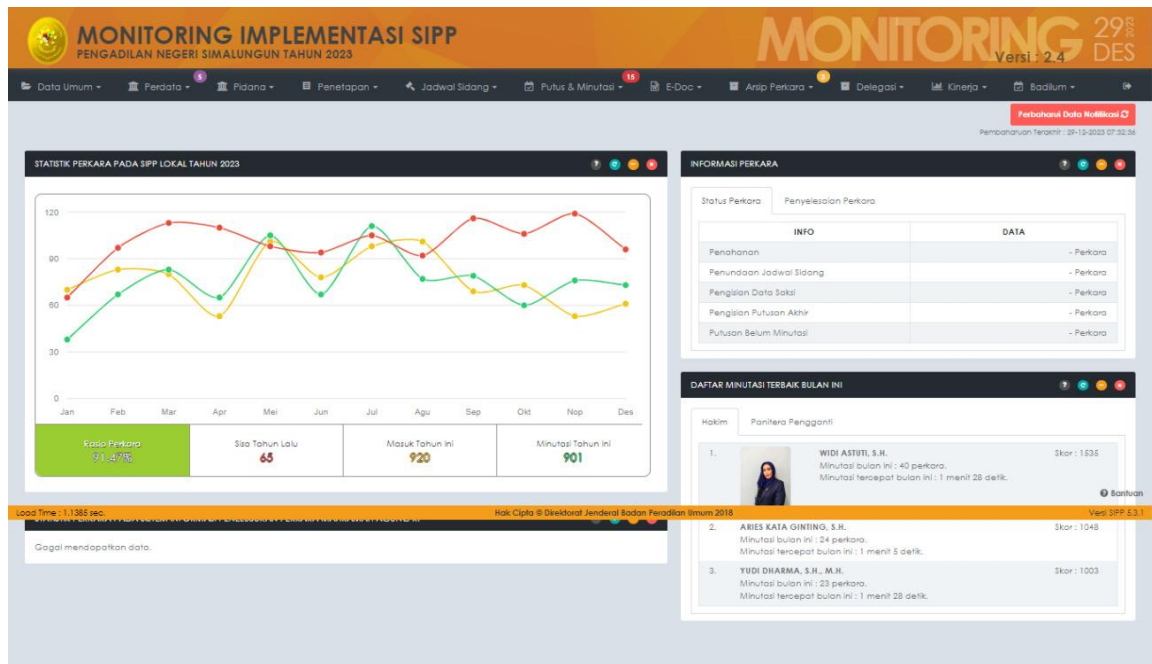
Pengadilan Negeri Simalungun saat ini menggunakan SIPP versi 5.3.1 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.3.1 Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

Gambar 8. Tampilan Screenshot SIPP Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun rutin melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi SIPP setiap bulan melalui Rapat Pleno Bulanan. Pada tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mencapai *green flag* dengan capaian nilai penanganan perkara 91,47% dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 65 berkas perkara. Saat ini ada penurunan kinerja dimana ditahun sebelumnya Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh nilai penanganan perkara 92,22%. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian majelis hakim karena adanya promosi dan mutasi hakim di akhir tahun 2023.

Gambar 9. Tampilan Screenshot MIS Pengadilan Negeri Simalungun



Bab 5

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



B A B V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menginstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Nomor 293/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Instruksi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Tujuan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada setiap badan Peradilan di Indonesia, khususnya Badan Peradilan Umum adalah untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesian Court Performance Excellent-ICPE*).

Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021.

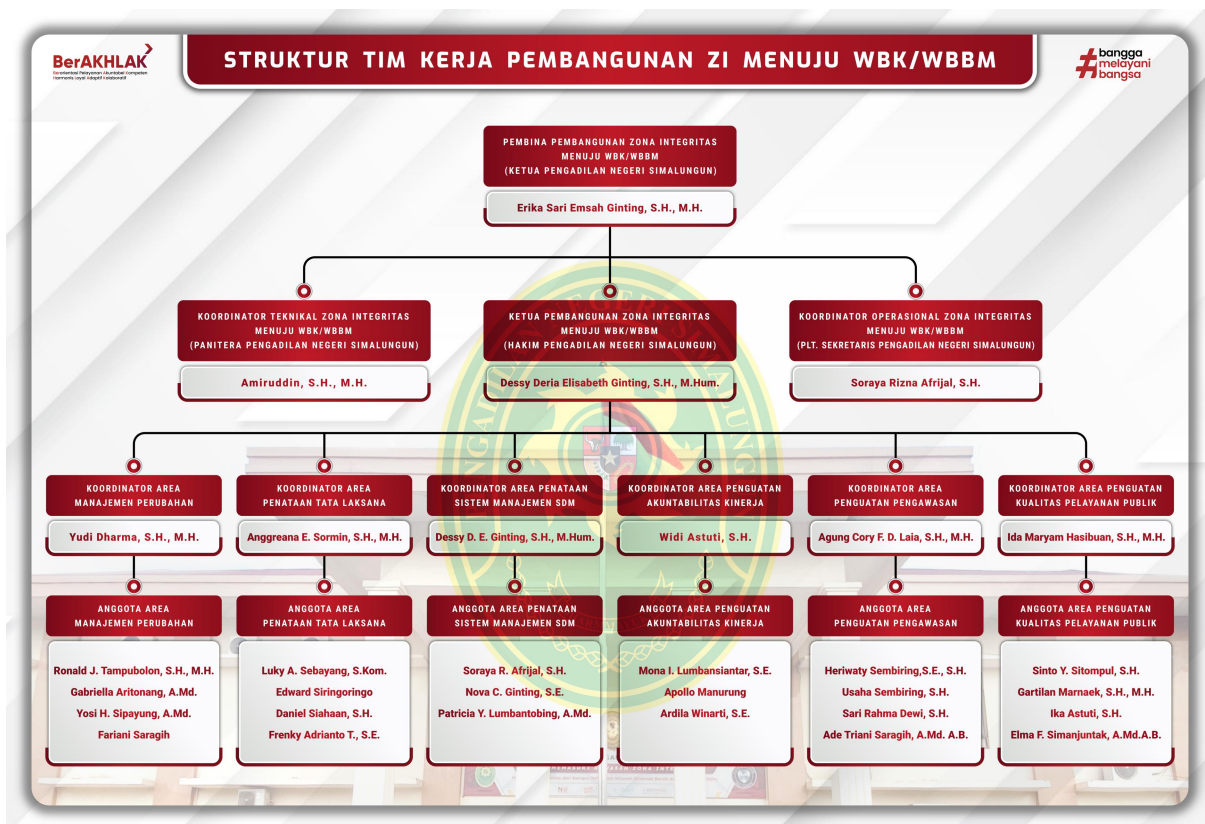
Gambar 10. Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun



Untuk dapat tetap memperoleh predikat tersebut ini, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari Pimpinan sampai dengan PPNPN di Pengadilan Negeri Simalungun. Beberapa langkah tersebut adalah :

1. Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 85/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut :

Gambar 11. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Simalungun



2. Pembinaan dan sosialisasi terus menerus yang berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi dalam pembangunan Zona Integritas. Komitmen pimpinan harus bertransfromasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (culture set) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para

Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga PPNN di Pengadilan Negeri Simalungun yang dilakukan setiap bulan juga. Pengadilan Negeri Simalungun juga secara rutin melaksanakan Apel dan Konsolidasi (AKSI) terkait Pembangunan Zona Integritas setiap minggunya yang dipimpin oleh masing-masing bagian.

Gambar 12. Rapat Unit Kesekretariatan



Gambar 13. Rapat Pleno Bulanan



Gambar 14. AKSI Kesekretariatan



3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat pembangunan zona integritas adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dibentuk melalui SK Ketua Pengadilan Negeri No. 81/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri 81/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang *Grand Design RB*, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Gambar 15. Rapat TIM RBI dalam Pemilihan Agen Perubahan



5. Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan telah dilakukan dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana dan prasarana harus rapi dan bersih. Sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan konsep 5 R yaitu pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ruang Sidang, Ruang Ramah Anak, Ruang Tahanan, Ruang Penuntut Umum, Ruang Laktasi, Ruang Mediasi, Ruang Kaukus, Ruang Pengunjung berikut fasilitasnya, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Posbakum, Sarana Disabilitas, Tempat Parkir Pengunjung dan Mobil Tahanan, serta Tempat Merokok. Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang

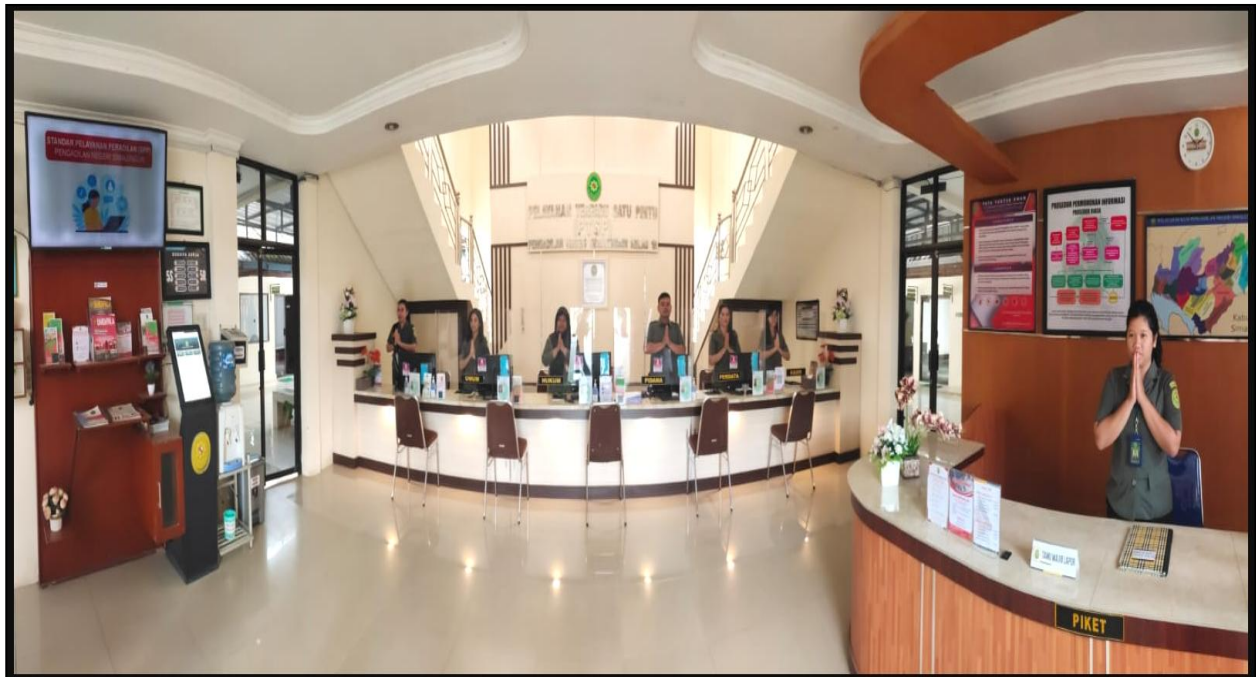
yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Juga telah tersedia televisi di ruang pengunjung, CCTV, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan genset.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, yang merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, sudah aktif dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B Nomor 78/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada ketentuan yang ada pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tata ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan tersebut. Pada tahun 2019, PTSP dilengkapi dengan Meja *Inzaghe* dan Meja *e-Court* sesuai amanat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Gambar 16. Ruang PTSP PN Simalungun



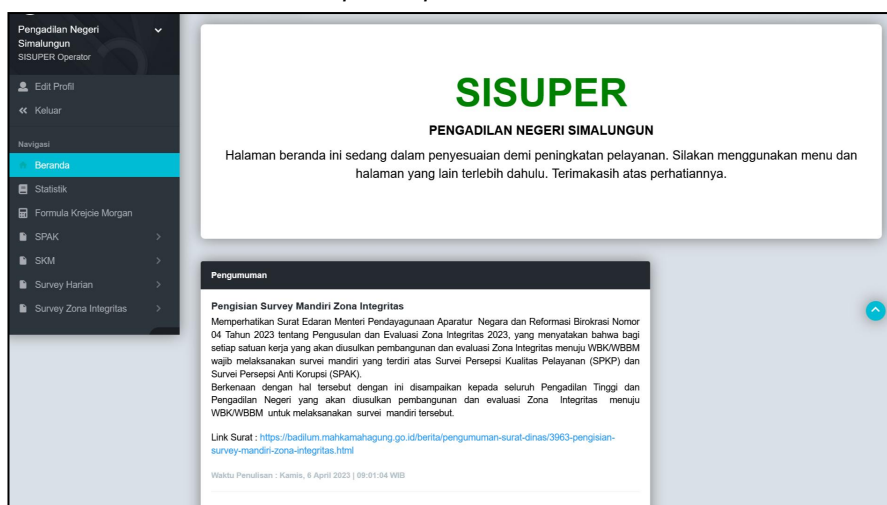
Pada bulan Juli Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil masuk tahap pertama lomba Pelayanan Pengadilan antar satuan kerja dari Dirjen Badan Peradilan Umum berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1017/DJU/HK02.3/7/2023 tentang Pengumuman Penilaian Tahap I Lomba Satuan Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023.

Gambar 17. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Lomba Pelayanan Pengadilan oleh Dirjen PAPU pada PN Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sejak tahun 2016. Survei dilaksanakan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan secara elektronik dengan aplikasi SiSUPER. Pelaksanaan survei dilakukan empat kali dalam setahun sejak tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen Badlum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badilum dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Gambar 18. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 triwulan pertama yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 yaitu 3,94 (tiga koma sembilan empat) atau 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima delapan) dalam kategori sangat baik, pada triwulan II yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 nilainya 3,92 (tiga koma sembilan dua) atau 99,28 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dan pada triwulan III dilaksanakan pada September 2023 dengan nilai 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) atau 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan). Nilai IKM triwulan IV dilaksanakan pada Desember 2023 dengan nilai 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) atau 98,68% (sembilan delapan koma enam delapan).

*Tabel 42. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Desember 2023*

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,90	Sangat Baik	8
2.	Prosedur	3,90	Sangat Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3,87	Sangat Baik	9
4.	Biaya dan Tarif	3,96	Sangat Baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,98	Sangat Baik	3
6.	Kompetensi Pelaksana	3,98	Sangat Baik	4
7.	Perilaku Pelaksana	3,99	Sangat Baik	2
8.	Sarana dan Prasarana	3,94	Sangat Baik	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,00	Sangat Baik	1

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 43. Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Jumlah Layanan di PTSP	Jumlah Permohonan Layanan	Keterangan
1	PN Simalungun	4	Hukum : 2085 Pidana : 1570 Perdata : 401 Umum : 2312	2.920

C. Inovasi Pelayanan Publik

Sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, Pengadilan Negeri Simalungun terus meningkatkan pelayanan publik dengan membuat inovasi, baik dari fasilitas yang ada, maupun dari pelayanannya. Hal ini tak lain sebagai salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung yaitu Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Tujuan

lainnya adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan pelayanan yang prima. Pengadilan Negeri Simalungun juga memberikan informasi secara online yaitu bisa melalui website dan media sosial lainnya.

1. Jenis Inovasi Pelayanan publik

a. E-Pelita

Gambar 19. Deskripsi Inovasi E-Pelita

e-Pelita (Permohonan Salinan Putusan Secara Elektronik)



Inovasi berbasis *google form* yang memudahkan para pengguna layanan untuk mengajukan permohonan salinan putusan berkekuatan hukum tetap secara *online* dengan mengisi form yang tersedia dan mengunggah persyaratan yang diperlukan.

Pengguna Inovasi :
Masyarakat Umum
Advokat

CARA KERJA

Pengguna layanan mengakses e-Pelita melalui *website* Pengadilan Negeri Simalungun, <https://bit.ly/e-pelita>, atau dengan memindai *QR code* pada brosur e-Pelita melalui ponsel pintar.

Pada tampilan awal e-Pelita, pengguna layanan memilih pihak berperkara atau tidak.

Kemudian pengguna layanan dapat memilih tujuan permohonan salinan putusan yang diajukan, mengisi data-data yang diperlukan, serta mengunggah persyaratan secara elektronik.

Pengguna lalu mengirimkan *form* permohonan dengan menekan tombol *submit* atau kirim.

Permohonan yang masuk akan diterima oleh staf Kepaniteraan Hukum untuk diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna layanan dapat mengambil salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTSP Hukum Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

PETUGAS / OPERATOR

Staf Kepaniteraan Hukum.

b. E- Pesona

Gambar 20. Deskripsi Inovasi E-Pesona

e-Pesona (Elektronik Form Penilaian Personal)



Form elektronik penilaian personal untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebelum berkunjung ke Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna Inovasi :
Kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.

CARA KERJA

Pengguna layanan mengakses e-Pesona melalui <https://bit.ly/e-Pesona> atau dengan memindai *QR code* pada brosur e-Pesona melalui ponsel pintar.

Pada tampilan formulir e-Pesona, pengguna layanan mengisi data-data yang diperlukan serta menjawab pertanyaan sesuai dengan jenis dan kebutuhan disabilitas.

Pengguna lalu mengirimkan form permohonan dengan menekan tombol *submit* atau kirim.

Formulir penilaian personal yang telah dikirimkan akan diterima dan diproses oleh Petugas PTSP sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

PETUGAS / OPERATOR

Petugas PTSP.

c. Syparis

Gambar 21. Deskripsi Inovasi Syparis




S Y P A R I S



Merupakan metode pembayaran panjar biaya perkara perdata secara *easy pay* menggunakan QRIS, dimana pihak berperkara dapat melakukan pembayaran dengan memindai QR code melalui berbagai platform pembayaran digital.

Pengguna Inovasi :

- Pihak yang melakukan pendaftaran perkara perdata



C A R A K E R J A

Pengguna layanan masuk / login ke aplikasi pembayaran digital yang mendukung metode pembayaran dengan menggunakan QRIS.

Pengguna layanan kemudian memindai QR code yang telah tersedia pada flyer QRIS melalui fitur scan QRIS pada aplikasi pembayaran digital yang digunakan.

Pengguna layanan memasukkan nominal panjar biaya perkara perdata yang harus dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada SKUM, kemudian melakukan autentikasi transaksi dengan memasukkan PIN / passcode pada aplikasi pembayaran yang digunakan.

Apabila transaksi berhasil dilakukan, pengguna layanan akan menerima notifikasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan.

Selanjutnya pembayaran akan dicek oleh Kasir untuk kemudian diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.



P E T U G A S / O P E R A T O R

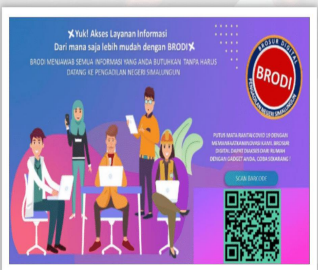
Kasir.

d. Brodi

Gambar 22. Deskripsi Inovasi Brodi




B R O D I (Brosur Digital)



Brosur digital yang didesain secara unik dan menarik berisi informasi Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Simalungun termasuk mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, dan biaya (jika ada) atas layanan di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna Inovasi :

- Jaksa
- Penyidik
- Masyarakat umum
- Advokat
- Stakeholder lainnya



C A R A K E R J A

Masyarakat / stakeholder lainnya dapat mengakses BRODI melalui website Pengadilan Negeri Simalungun pada alamat <https://www.pn-simalungun.go.id>.

Masuk ke menu Layanan Publik, kemudian pilih menu E-Brosur (BRODI).

Gunakan aplikasi pemindai QR code pada ponsel pintar untuk memindai QR code pada halaman BRODI.

Pilih / klik jenis layanan yang ingin dilihat, informasi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk brosur digital pada perangkat elektronik yang digunakan.



P E T U G A S / O P E R A T O R

Aplikasi dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan operator.

e. Pangsid

Gambar 23. Deskripsi Inovasi Pangsid

PANGSSID (Panggilan Suara Sidang)

CARA KERJA

PANGSSID merupakan aplikasi untuk menyuarkan panggilan sidang yang dapat diakses oleh petugas jaga sidang melalui alamat <https://192.168.1.106/pangsid>.

PANGSSID dapat digunakan untuk memanggil para pihak yang akan mengikuti persidangan, mengumumkan panggilan untuk rapat bulanan, apel, maupun panggilan kustom lainnya.

Untuk menyuarkan panggilan sidang, petugas jaga sidang dapat memilih nomor perkara sesuai dengan antrian sidang, kemudian memilih para pihak yang akan dipanggil (Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, atau para pihak yang berperkara).

Untuk panggilan kustom lainnya, petugas jaga sidang dapat mengetikkan kalimat yang akan diumumkan melalui menu "Kustom Panggil". Kalimat tersebut kemudian akan diuarakan secara otomatis oleh announcer pada aplikasi PANGSSID.

Adapun untuk menu Panggilan Sidang, PANGSSID telah terintegrasi dengan data dari SIPP Pengadilan Negeri Simalungun.

Aplikasi panggilan suara (announcer) yang digunakan untuk mempermudah melakukan panggilan kepada para pihak yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Simalungun, terutama untuk perkara perdata.

Pengguna Inovasi :
Para pihak yang akan bersidang.

PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

f. E- Checklist

Gambar 24. Deskripsi Inovasi E-Checklist

E - CHECKLIST (Electronic Checklist)

CARA KERJA

Petugas PTSP bagian Perdata dapat mengakses e-Checklist melalui alamat <https://192.168.1.106/e-checklist>.

E-Checklist akan menampilkan checklist yang berisi daftar persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengguna layanan PTSP bagian Perdata sesuai dengan SPP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

Apabila persyaratan yang diminta telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, petugas akan memberikan tanda check pada poin yang sesuai di tampilan E-Checklist.

Petugas dapat mengetahui lengkap atau tidaknya persyaratan atas suatu layanan yang diminta dengan melihat poin - poin pada checklist tersebut.

Aplikasi yang memudahkan petugas PTSP dalam memeriksa kelengkapan berkas - berkas yang diajukan oleh pengguna layanan.

Pengguna Inovasi :
Panitera
Panmud Perdata
Petugas PTSP Meja Perdata
StaF Perdata

PETUGAS / OPERATOR

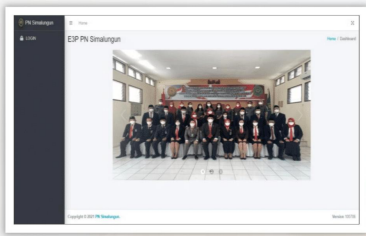
Petugas PTSP Bagian Perdata.

g. E3P

Gambar 25. Deskripsi Inovasi E3P




E3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan Persidangan)



Aplikasi berbasis data SIPP yang berguna untuk memberitahukan status kehadiran para pihak pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim dan Panitera secara *real-time*, khususnya untuk perkara Perdata.

Pengguna Inovasi :

- Hakim
- Panitera Pengganti
- Petugas Sidang

C A R A K E R J A

Petugas jaga sidang dapat mengakses E3P melalui alamat <https://192.168.1.106/E3P>.

Petugas dapat *login* dengan menggunakan user petugas.

Petugas kemudian memilih menu "Lapor Kesiapan Sidang", kemudian memilih menu "Lapor Persidangan".

Petugas memilih nomor perkara para pihak yang telah hadir dan siap untuk mengikuti sidang, kemudian mengisi menu "Kehadiran" dengan nama para pihak yang telah hadir beserta keterangan kehadirannya.

Simpan, kemudian tekan tombol "Kirim".

E3P akan secara otomatis mengirimkan notifikasi bahwa persidangan dapat segera dimulai melalui aplikasi **Telegram** kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara tersebut.

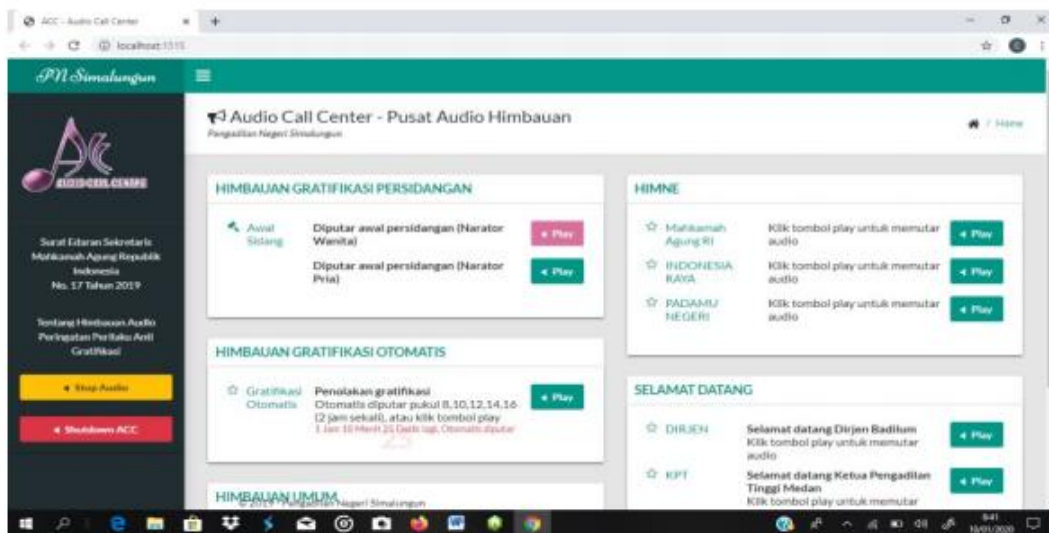
P E T U G A S / O P E R A T O R

Petugas Jaga Sidang.

h. Audio Gratifikasi

Sesuai SE SEKMA RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, Pengadilan Negeri Simalungun telah memiliki aplikasi yang memudahkan implementasi SEMA tersebut setiap dua jam sekali.

Gambar 26. Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi



j. Meja *e-Court* PN Simalungun digawangi oleh seorang Duta *e-Court* berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/KPN/SK.HK2.4/XII/2023 yang memiliki pengetahuan mengenai tata cara penggunaan aplikasi *e-Court* untuk membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akun maupun untuk mendaftarkan perkaranya. Duta *e-Court* juga akan dengan senang hati membantu para pihak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai keuntungan berperkara melalui *e-Court*.

Gambar 27. Duta E-Court Pengadilan Negeri Simalungun



Bab 6 Pengawasan



A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 68/KPN/SK.PW.1.1/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023.

Tabel 44. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Penata Tk I/ III/d	Agung Corry F.D. Laia, S.H., M. H.
2	Hakim Pengawas Bidang Perdata dan Pelaksanaan Eksekusi	Penata Tk I/ IV/a	Yudi Dharma, S. H., M. H.
3	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Penata Tk I/ IV/a	Ida Maryam Hasibuan, S. H., M. H.
4	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Penata Tk I/ III/d	Widi Astuti, S. H.
5	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata Tk I/ III/d	Anggreana E. R. Sormin, S. H., M. H.
6	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Penata Tk I/ III/d	Dessy D. E. Ginting, S.H, M. Hum.

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan

3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 :

Tabel 45. Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima melalui Aplikasi SIWAS	4
2	Jumlah Pengaduan Yang Diterima melalui Surat	2
3	Jumlah Pengaduan Yang Telah Klarifikasi	6
4	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2023 ada 6 (enam) laporan dan seluruh pengaduan baik melalui aplikasi SIWAS maupun surat masuk sudah diklarifikasi serta sudah diupload pada SIWAS. Pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin jumlahnya nihil.

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;

- b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi perkara
- a. Prosedur penerimaan permohonan banding, kasasi, dan PK
 - b. Keuangan perkara;
 - c. Pemberkasan kearsipan dan laporan.
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
- a. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - b. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
- a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :
- a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
 - e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten
Harmonis /oyal / daptif / olaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Bab 7

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Simalungun telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu oleh Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan nilai A (Excellent) yang diserahkan di Makassar pada tanggal 28 November 2018 dan tetap mempertahankan predikat tersebut pada tahun 2022.
3. SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun masih belum memadai secara kuantitas tapi dengan berbagai pembinaan internal dan pola mutasi internal yang dilakukan dengan pendekatan *the right person at the right place*, Pengadilan Negeri Simalungun mampu memberikan performa terbaiknya;
4. Pengelolaan anggaran sudah dilakukan dengan baik yang tercermin dari tercapainya realisasi anggaran di atas 99% baik pada DIPA 01 maupun DIPA 03;
5. Dukungan teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital bagi terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun serta untuk menyukseskan program Mahkamah Agung dalam proses administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik melalui implementasi *e-Court* dan SIPP;
6. E-Berpadu sebagai inovasi terbaru Mahkamah Agung sudah terimplementasi dengan baik sejak 1 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Simalungun.
7. *E-Court* dan SIPP sudah terimplementasi dan secara konsisten dipergunakan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.
9. Pada tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mencapai *green flag* dengan capaian nilai penanganan perkara 91,47%.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2023 ini, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki beberapa rekomendasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yaitu:

1. Perlu diadakan penambahan tenaga teknis terutama Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Perlu adanya penambahan tenaga non teknis yaitu Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun, karena sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki pejabat definitif Sekretaris.
3. Agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat peradilan;
4. Diharapkan usulan anggaran yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan kebutuhan *riil* dan skala prioritas dapat dikabulkan. Sehingga kebutuhan akan perangkat pengolah data dapat dipenuhi demi menunjang keberhasilan administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik;
5. Pemenuhan fasilitas pendukung *e-Litigasi* sudah sangat mendesak untuk dilakukan agar tidak terjadi kendala yang dapat mengganggu kelancaran persidangan secara elektronik;
6. Agar terus diadakan pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada, baik itu pendukung administrasi perkara secara elektronik, maupun aplikasi pendukung tugas kepaniteraan dan kesekretariatan lainnya, sehingga data yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang semakin akurat dan akuntabel.